

Daftar Pustaka

a. Buku

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. Cet. Ke-2.* (Bandung : Refika Aditama. 2009).
- Harsono, Boedi *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksaaannya.* (Jakarta: Djambatan. 1993).
- Perangin, Effendi. *Praktek Jual Beli Tanah.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994).
- Rakmat, Jalaudin. *Metode Penelitian Komunikasi.* (Bandung: CV Remaja Karya. 1985).
- Saleh, K. Wantjik. *Hak Anda Atas Tanah.* (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985).
- Santosa,Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah.* (Jakarta: Kencana. 2013).
- Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum. Cet-1.* (Bandung : Binacipta. 1991),
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.* (Jakarta : Alumni. 1996).
- Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta.* (Bandung : Mandar Maju. 2011).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* (Jakarta: UI-Press. 2007).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990).
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian.* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1989).
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian.* (Jakarta : PT Pradnya Paramita. 1993).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif.* (Bandung: Alfabeta. 2009).

Sumarjono, Maria, S.W. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Bagian II*. (Jakarta : Kompas Media Nusantara. 2001).

Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2009).

Winarta, I Made. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. (Yogyakarta: Andi Offset. 2006).

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SOP);

Putusan Pengadilan Negeri dengan nomor register perkara: 75/Pdt.G/2020/PN Sbr.

c. Jurnal dan Skripsi

Wulandari, Yunistika Risma. *Upaya Hukum Penyelamatan Aset Tanah Pemerintah Kota Magelang Yang dikuasai Oleh Pihak Ketiga*. (Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2020).

Pramesti, Fahrinda Khansa. *Kekuatan Bukti Kepemilikan Letter C Dalam Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah*. (Skripsi Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. 2020).

Yunita, Farah Rana. *Status Hukum dan Akibat Hukum Terhadap Tanah Terindikasi Telantar*. (Skripsi Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. 2021